

## LANDASAN FILSAFAT MANUSIA DALAM PENGEMBANGAN ILMU PENDIDIKAN DI INDONESIA

Oleh:

Rukiyati

### Abstrak

Ilmu pendidikan dan pendidikan di Indonesia memang menunjukkan perkembangan yang tidak selalu seiring sejalan. Dapat dikatakan bahwa praktik pendidikan yang dilakukan berjalan dalam keadaan “*business as usual*”. Secara filosofis, pendidikan di Indonesia berdasarkan filsafat Pancasila. Faktanya, pendidikan di Indonesia berlangsung selama ini tanpa pernah dipersoalkan landasan teoritiknya. Artinya, ilmu pendidikan kurang dikembangkan di Indonesia.

Pendidikan di Indonesia dijalankan dengan lebih banyak meminjam (*borrowing*) atau mencangkok ide-ide (teori) dan praktik pendidikan dari luar tanpa memperhatikan konteks sosio-kultural masyarakat Indonesia dan nilai-nilai khas Indonesia. Pendidikan dengan cara mencangkok tampaknya lebih disukai oleh para pengambil kebijakan dan praktisi pendidikan di Indonesia. Sebenarnya, fenomena pencangkokan sistem, metode, model pendidikan merupakan gejala umum yang terjadi di mana-mana, bukan hanya Indonesia. Tetapi, bila tidak ditindaklanjuti dengan upaya “pribumisasi” berbagai teori dan praktik yang diambil tersebut, maka praktik pendidikan berjalan tanpa arah yang jelas. Oleh sebab itu ilmu pendidikan yang berciri khas Indonesia perlu dikembangkan terus.

Kata kunci: filsafat manusia, ilmu pendidikan

### A. Pendahuluan

Ilmu pendidikan secara historis berkembang di Indonesia lebih muda dari praktik pendidikan itu sendiri. Sebagaimana dinyatakan oleh Tilaar (2004: 125-126) bahwa praktik pendidikan di Indonesia dapat dilacak dari masa pra-Hindu, masa Hindu-Budha, masa Islam dan masa Kolonial. Pada masa sebelum kolonial, praktik pendidikan belum sistematis-ilmiah. Tetapi, pada masa kolonial mulai ada teori-teori pendidikan yang sistematis dengan mengacu pada teori pedagogi di Belanda. Dibukanya sekolah-sekolah guru dan dilanjutkan dengan adanya kursus-kursus B1 dan B2 merupakan rintisan awal kesejalaran teori dan praktik pendidikan. Upaya ini dilanjutkan dengan dibukanya Fakultas Filsafat dan Pedagogi UGM pada tahun 1948 yang kelak berubah menjadi IKIP

Yogyakarta. Selain itu, dibuka pula PTPG pada tahun 1954 di empat kota: Batusangkar, Bandung, Malang dan Tondano yang kemudian juga berubah menjadi IKIP.

Perbedaan antara Fakultas Filsafat dan Pedagogi dengan PTPG terletak pada landasan teoritiknya. Pada Fakultas Pedagogi diutamakan kajian ilmu pendidikan yang teoritis berorientasi kontinental (Belanda) dengan penekanan pada hakikat manusia dalam proses mem manusia (menjadi manusia) sehingga memandang penting nilai-nilai moral dalam proses pendidikan, sedangkan orientasi PTPG lebih kepada bagaimana cara mengajar yang baik (metode pembelajaran).

Setelah tahun 50-an orientasi pendidikan Indonesia beralih ke Amerika Serikat. Banyak sarjana Indonesia yang lulus dari Amerika Serikat dengan kajian teori-teori pendidikan Amerika, khususnya yang bercorak filsafat pragmatisme/ eksperimentalisme dengan menggunakan metode kuantitatif. Kajian-kajian abstrak mulai ditinggalkan dan diganti dengan masalah-masalah praktis seperti metode mengajar, teknik evaluasi, dan sebagainya.

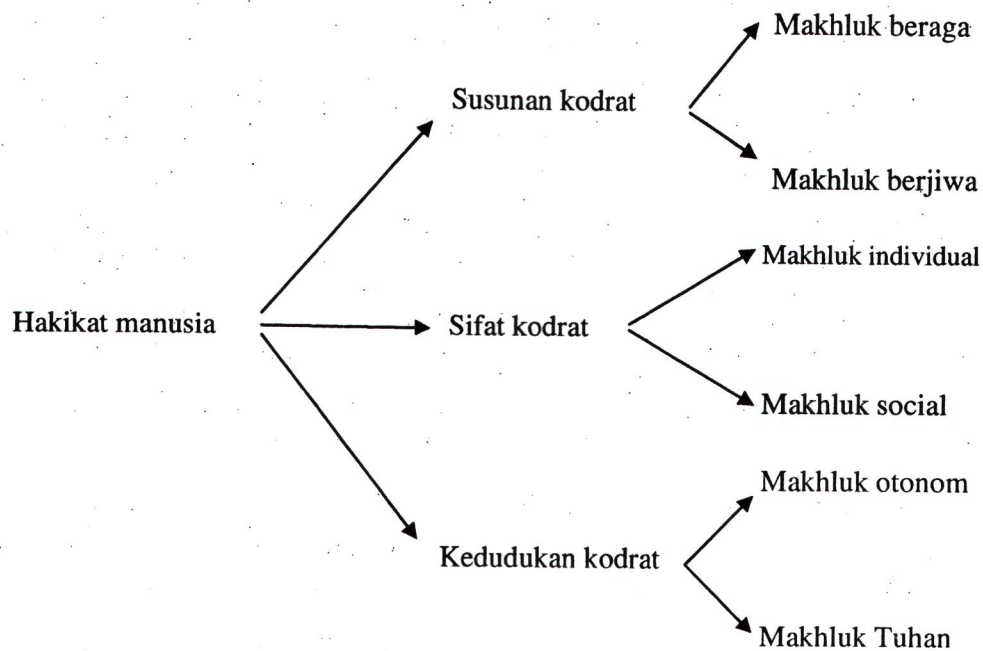
Selain itu, praktik-praktik pendidikan di Indonesia sarat dengan muatan politis. Pada masa Orde Lama, praktik pendidikan didasarkan pada ambisi politik yang bersifat ideologis, sedangkan pada masa Orde Baru praktik pendidikan diarahkan pada konsep pembangunanisme sehingga manusia menjadi manusia komoditi/SDM dan mesin pembangunan ekonomi. Pada masa Reformasi awal sampai sekarang ada kecenderungan pola "proses pendidikan" yang mengarah pada dehumanisasi. Banyaknya paham, aliran, teori yang masuk ke Indonesia dengan asumsi masing-masing menunjukkan gejala pendidikan kita semakin kurang terarah, terpisah-pisah, tidak mempunyai konsep yang menjadi konsensus bersama para ahli pendidikan secara nasional. Para ahli dan praktisi pendidikan Indonesia tidak pernah atau belum pernah secara sistemik-teoritik dan kontinyu membahas: Apa yang menjadi landasan filosofis ilmu pendidikan yang perlu dikembangkan di Indonesia? Corak pendidikan seperti apa yang akan kita laksanakan?

## B. Pembahasan

### 1. Konsep manusia dan pendidikan

Pendidikan selalu berangkat dari citra pribadi ideal dan masyarakat ideal. Maka, perlu disusun suatu bangun sistem (teori normatif dan teori empiris) ilmu pendidikan beserta penjabarannya dalam pelebagaan, perundang-undangan dan kurikulum serta praksis di lapangan. Singkatnya, perlu pemikiran terpadu dari hulu sampai hilir pendidikan. Hal ini dapat dimulai dari kejelasan filsafat pendidikan di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan nasional kita berlandaskan pada Pancasila. Hal ini tertuang secara eksplisit di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tetapi penjabarannya dalam suatu teori pendidikan belum ada atau masih kabur, belum ada konsensus nasional ilmuwan pendidikan. Demikian pula langkah-langkah kongkrit untuk mewujudkan pendidikan yang berjiwa Pancasila perlu dilakukan. Kita perlu mencari konfigurasi yang tepat untuk mewujudkan teori pendidikan khas Indonesia.

Dengan landasan filsafat Pancasila, kita dapat mengembangkan teori pendidikan yang bersifat humanistik-religius yang khas Indonesia. Paulo Freire (Giroux, 1999: 4) mengatakan bahwa: *“every educational practice implies a concept of man and the world”*. Berangkat dari pernyataan tersebut, teori pendidikan Indonesia yang humanistik-religius dapat dikatakan bertitik tolak dari pandangan antropologi-filsafati yang bersifat monopluralis sebagaimana dinyatakan oleh Notonagoro (1987: 6). Manusia pada hakikatnya adalah makhluk monopluralis, artinya manusia itu satu entitas sebagai *human being* yang mempunyai susunan kodrat, sifat kodrat dan kedudukan kodrat sebagaimana dapat dilihat pada bagan berikut:



Setiap aspek dari susunan kodrat, sifat kodrat dan kedudukan kodrat bersifat monodualis yang harus diwujudkan dalam keadaan seimbang. Pandangan tentang hakikat manusia ini membawa implikasi pedagogi dan praktik pendidikan yang bersifat transformatif. Pengembangan potensi manusia sesuai dengan hakikat kodratnya merupakan keharusan. Inilah teori pendidikan yang melibatkan integrasi antara proses individuasi dan proses partisipasi dalam kehidupan social, dengan penekanan pada dimensi sosialitas-horizontal. Di lain sisi, tidak cukup dimensi sosialitas manusia, tetapi perlu pula landasan transcendental yang bersifat dimensi vertikal, sandaran Ilahiah akan keberadaan manusia. Pendidikan mengupayakan terwujudnya dimensi kemanusiaan yang utuh dengan basis humanisme-religius. Manusia ditempatkan terhormat sebagai makhluk Tuhan yang arahnya jelas, yaitu mencapai keselamatan dunia-akhirat.

Manusia sebagai subjek dan objek material ilmu pendidikan diupayakan untuk menjadi lebih baik sesuai dengan potensi kemanusiaannya, yaitu manusia yang jasmaninya sehat, kuat dan rohaninya mencapai tujuan yang penuh; berilmu (mencari kebenaran), berasa (merasakan keindahan, mengekspresikan

dan merefleksikan keindahan sampai kepada Yang Mutlak bila dimungkinkan), berkarsa (memiliki kehendak moral yang menunjukkan kesusilaannya). Manusia Indonesia juga diupayakan untuk hidup layaknya manusia individu dengan persona diri yang unik, maka pendidikan diarahkan untuk mengaktualkan kepribadian yang seimbang antara diri pribadi dengan perannya sebagai anggota masyarakat. Untuk itu diperlukan pengembangan citra diri, harga diri dan diri ideal yang wajar. Agar subjek dapat hidup seimbang antara individualitas dan sosialitasnya, perlu pula pengembangan peran sosial agar dapat berpartisipasi dalam masyarakat Indonesia yang demokratis dan multikultural. Manusia Indonesia yang terdidik mempunyai pemahaman dan penghayatan yang jelas tentang nilai-nilai, tidak gamang terhadap nilai-nilai yang ditawarkan, tetapi justru dapat hidup di antara nilai-nilai tradisi etnik dengan kultur lokalnya dan nilai-nilai keindonesiaan, bahkan dengan nilai-nilai global.

Pendidikan diupayakan pula untuk mengaktualkan potensi manusia sebagai makhluk otonom, mandiri, dapat bertanggung jawab terhadap hidup dan keputusan yang dilakukan dalam hidupnya, tetapi tetap dalam interdependensi dengan yang lain. Pendidikan diupayakan juga untuk mewujudkan konsep manusia sebagai makhluk Tuhan. Manusia Indonesia perlu mendapatkan pendidikan yang mengupayakan internalisasi religiusitas dalam diri subjek didik dengan menimbang semangat kebhinekaan dan toleransi. Nilai-nilai etik universal keyakinan agama menjadi dasar bagi subjek didik menjalin hubungan dengan sesama manusia yang berbeda keyakinan, sementara nilai-nilai akidah-ibadah menjadi dasar bagi subjek didik dalam mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Pengenalan subjek akan asal dan tujuan dirinya, "sangkan paran" yang menyadarkannya bahwa ia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna dalam ketidaksempurnaannya. Pendidikan agama, pendidikan religiusitas adalah wujud nyata yang perlu diupayakan terus implementasinya agar manusia Indonesia itu menjadi sosok yang humanis-religius. Religius dalam arti memiliki kesadaran sebagai makhluk Tuhan dengan keyakinan agama masing-masing, yang dapat berinteraksi secara positif dengan orang yang beragama lain dengan

berpegang pada nilai-nilai universal agama (kejujuran, keadilan, kedamaian, dsb.)

## **2. Dua kutub tujuan pendidikan**

Selama ini ada dua kutub dalam mensikapi tujuan pendidikan. Dalam praktik ada kecenderungan menekankan tujuan manusia (*being good*) dan ada yang menekankan tujuan manusia cerdas (*being smart*). Karena menekankan salah satu sisi saja, maka jelas hasilnya mengisyaratkan ketidaklengkapan sebagai manusia ideal berdasar filsafat Pancasila. Kalau menekankan “being good” dapat terjadi subjek didik menjadi orang-orang bermoral, orang-orang baik, tetapi tidak berilmu, akhirnya akan menjadi dependen, atau lebih parah lagi menjadi beban masyarakat. Masyarakat menjadi tidak maju peradabannya. Tetapi, dapat pula ditafsirkan bahwa “being good” tercakup pula didalamnya kehendak baik untuk menjadi pintar/cerdas, mengaktualisasikan potensi memperoleh kebenaran ilmiah sehingga akhirnya ia menjadi “being smart” dalam “being good”. Kalau ditafsirkan tujuan manusia baik terpisah dengan tujuan manusia cerdas, artinya masing-masing tujuan berjalan dengan ekstrimitasnya sendiri, maka yang terjadi adalah ketimpangan manusia.

Orang yang hanya dididik untuk menjadi cerdas tanpa nilai-nilai moral (mengabaikan moral) dapat lebih berbahaya daripada orang yang baik, tetapi kurang cerdas. Manipulasi, korupsi dan kejahatan besar dilakukan oleh orang-orang yang cerdas, tetapi tidak bermoral. Itulah yang terjadi di Indonesia.

Para penganut tujuan manusia cerdas mengutamakan wacana prestasi akademik terutama di sekolah-sekolah, Ini gejala yang mendunia. Di Amerika Serikat sebagaimana dinyatakan oleh Thomas Armstrong dalam bukunya: *The Best Schools* (2006: 17) bahwa asal-muasal wacana prestasi akademik dalam pendidikan di AS telah dimulai sejak tahun 1893 dengan adanya rekomendasi dari *Committee on Secondary School Studies (Committee of Ten)* yang memisahkan kurikulum untuk siswa yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi

dan yang tidak. Pemisahan ini berlanjut sampai sekarang dengan berbagai instrumen yang digunakan mengacu pada tes intelegensi. Armstrong mengajukan wacana yang dapat dikatakan memadukan tujuan manusia cerdas dan baik sekaligus, yaitu pengembangan manusia. Menurut penulis, inilah model yang lebih dekat dengan konsep manusia Indonesia yang bersifat monopluralis.

Sebenarnya, Indonesia secara historis juga mempunyai tujuan yang lebih lengkap. Undang-Undang Pengajaran Tahun 1951 dinyatakan bahwa tujuan pendidikan menjadikan manusia Indonesia yang dewasa-susila. Artinya, ada unsur cerdas (dewasa berarti juga potensi kecerdasan manusia terasah) dan dieksplisitkan sisi susila sebagai ciri juga dari manusia yang dewasa. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 juga mengeksplisitkan tujuan pendidikan yang holistic, ideal, yang secara umum dinyatakan bahwa pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, memiliki kesehatan jasmani dan rohani, memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Demikian pula tujuan pendidikan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dinyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dari rumusan ini tampak bahwa tujuan pendidikan adalah mengusahakan agar peserta didik menjadi orang yang baik dan cerdas.

Faktanya, dalam implementasi justru terjadi pengkutuban ke arah manusia cerdas saja. Tujuan manusia baik terabaikan, tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh, hanya menjadi wacana yang hilang timbul. Sebaliknya, pengejaran nilai akademis yang tinggi dilandasi motivasi baik dari guru maupun orang tua siswa sendiri dengan asumsi prestasi akademis akan memudahkan

peserta didik untuk masuk ke sekolah "unggulan" dan perguruan tinggi favorit. Bila lulus kelak, ia akan segera memperoleh pekerjaan dengan gaji yang besar dan dipandang sebagai orang yang sukses dalam hidup. Singkatnya, pendidikan di Indonesia pun dalam kenyataan/praktiknya direduksi sekedar menjadi instrument agar seseorang dapat masuk dalam pasaran kerja. Kerja mendidik disamakan dengan mencetak tenaga kerja trampil, kompeten dalam bidangnya, menguasai iptek yang dibutuhkan dalam dunia industri. Kecenderungan ini lama-kelamaan akan membawa pada bahaya kemanusiaan ketika pendidikan (terutama di sekolah) tidak ubahnya seperti "pabrik" yang menciptakan produk berupa manusia trampil.

Sejalan dengan pemikiran yang ditawarkan Armstrong, maka diperlukan upaya merealisasikan dengan sungguh-sungguh tujuan pendidikan yang holistic. Pendidikan yang bertujuan holistic mensyaratkan adanya upaya-upaya untuk mengaaktualisasikan semua potensi peserta didik ke dalam berbagai kegiatan dengan mengacu pada kecerdasan ganda (majemuk), Kegiatan pembelajaran yang merangsang kecerdasan intelektual dilaksanakan berbarengan dengan kegiatan pembelajaran yang memperhatikan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Jadi, ada keseimbangan antara IQ, EQ dan SQ.

Sudah sejak lama para ahli pendidikan mengemukakan pentingnya pengembangan aspek kognitif (*being smart*) berjalan seiring dengan aspek afektif dan sosial (*being good*). Piaget (1969) mengatakan bahwa: "*The affective and social development of the child follows the same general process, since the affective, social and cognitive aspects of behavior are in fact inseparable.*" Hal-hal yang afektif membentuk semangat atau jiwa dari pola perilaku yang strukturnya berhubungan dengan fungsi kognitif, tidak dapat satupun berfungsi tanpa yang lain.

Akhir-akhir ini banyak pula perkembangan pemikiran ilmiah yang mengarah pada manifestasi kecerdasan spiritual dalam pendidikan. Ari Ginandjar Agustian selalu mengetengahkan perlunya manusia mengasah kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual secara



seimbang. Ditemukannya “god spot” dalam syaraf-syaraf otak membuktikan bahwa manusia mempunyai potensi untuk menjadi khalifah di bumi yang membawa misi rahmatan lil alamin. Manusia cerdas bergeser artinya tidak sekedar manusia pintar intelektualnya, tetapi cerdas dimaknai pula cerdas-cendekia, cerdas hati, cerdas religious, Kecerdasan yang menyeluruh melingkupi matra-matra kemanusiaan.

### 3. Paradigma pengembangan manusia dalam pendidikan holistik

Pendekatan “*Human Development Discourse*” dari Armstrong bertitik tolak dari paradigma keutuhan dan proses menjadi manusia itu sendiri. Dalam konteks Indonesia, perlu dimasukkan pula landasan religiusitas sehingga menjadi paradigma humanisme religius. Sebagaimana dinyatakan oleh Armstrong (2006: 14), pendekatan berdasar paradigma pengembangan manusia ini mempunyai diri-ciri:

- a. Berorientasi waktu tidak hanya ke masa depan, tetapi masa lalu, masa sekarang dan masa depan;
- b. Pendekatan penelitian pendidikan mengutamakan riset kualitatif bukan kuantitatif semata;
- c. Metode penilaian (*assessment*) bersifat *naturalistic observation*, sedangkan metode penilaian bersifat pengukuran kuantitatif dapat menjadi pelengkap, tetapi bukan yang utama;
- d. Pembelajaran mengacu pada proses dari awal sampai akhir, bukan hanya produk akhir;
- e. Materi pembelajaran tidak hanya “*academic skills*” yang difokuskan pada mata pelajaran tertentu, melainkan seluruh hal penting untuk dapat menyelenggarakan hidup sebagai manusia seutuhnya (“*how to live as a whole human being*”);

- f. Peran guru yang paling penting bukan menjalankan mandat kelembagaan dengan fungsi-fungsi manajerial yang ketat dan bersifat administrative belaka, melainkan yang terpenting adalah menginspirasi peserta didik untuk gemar belajar;
- g. Klaim keberhasilan tidak terletak pada hasil riset kuantitatif, melainkan pada “kekayaan pengalaman manusiawi pendidik dan peserta didik bersama-sama”.
- h. Mata pelajaran yang penting tidak hanya Membaca, Matematika dan Sains, melainkan semuanya: *Life skills*, Seni, Humanities, dan lain-lain yang diperlukan untuk hidup.
- i. Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah kedewasaan dan kebahagiaan peserta didik sebagai manusia.

Mengingat bahwa pengembangan ilmu pendidikan di Indonesia yang tidak hanya humanis, melainkan juga religius, maka perlu diperhatikan pula bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai subjek didik adalah kedewasaan dan kebahagiaan dunia-akhirat. Untuk itu, sangat perlu dirancang pembelajaran berbasis ajaran agama yang holistik-seimbang antara aspek kognitif, afektif dan psikomotoriknya, di samping pembelajaran hal-hal yang penting lainnya.

Pendekatan pengembangan manusia yang holistik membawa implikasi pentingnya merumuskan dan menjabarkan rambu-rambu yang dapat digunakan oleh para praktisi pendidikan (guru, kepala sekolah, pejabat di pusat dan daerah) agar dapat memahami, melaksanakan ilmu pendidikan yang berdasarkan pada landasan filsafat manusia Indonesia (berdasar Pancasila).

### **C. Penutup**

Ilmu pendidikan di Indonesia berkembang seiring dengan adanya tarik menarik dan pencangkakan ide-ide dari luar (terutama di negara-negara maju) tanpa ada upaya bersama untuk memperkokoh basis filosofisnya sesuai dengan falsafah bangsa. Untuk pengembangan ilmu pendidikan di Indonesia di masa depan, perlu dilakukan pemikiran lanjut mengenai konseptualisasi ilmu pendidikan yang berbasis

pada filsafat manusia monopluralis. Konsep manusia monopluralis dijabarkan dari filsafat Pancasila yang berdimensi holistik menempatkan manusia dalam suatu pandangan yang multidimensional.

Pendidikan yang bertitik tolak dari konsep manusia holistik dipandang lebih mampu membangun kepribadian peserta didik ke arah keutuhan kemanusiaan. Maka, sudah saatnya para ahli dan pemikir pendidikan mempunyai komitmen bersama untuk menghasilkan pemikiran sistematis-ilmiah untuk memperkuat posisi ilmu pendidikan yang berciri epistemologi Indonesia.

#### D. Daftar Pustaka

- Ary Ginandjar Agustian. 2008. *Pembentukan Habit Menerapkan Nilai-nilai Religius, Sosial dan Akademik*. Proceeding. Seminar dan Lokakarya Nasional Restrukturisasi Pendidikan Karakter. Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta. 29 Juli 2008.
- Armstrong, Thomas. 2006. *The Best School. – How Human Development Research Should Inform Educational Practice*. Virginia: Association for Supervision and Curriculum Development.
- Depdikbud. 1989. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Depdiknas. 2003. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Gardner, Howard. 2003. *Multiple Intelligence – Kecerdasan Majemuk – Teori dalam Praktek*. Batam: Interaksara. Alih bahasa: Alexander Sindoro.
- Giroux, Henry A. 1988. *Teachers as Intellectual - Toward a Critical Pedagogy of Learning*. New York: Bergin & Garvey.
- Notonagoro. 1987. *Pancasila secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Pantjuran Tujuh.
- Tilaar, H. A. R. 2002. *Perubahan Sosial dan Pendidikan – Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo.